

**IMPLEMENTASI PASAL 12 UNDANG-UNDANG NOMOR 18
TAHUN 2013 TENTANG PENCEGAHAN DAN
PEMBERANTASAN PERUSAKAN HUTAN PERSPEKTIF FIQH
SIYASAH**
(Studi di Hutan Kawasan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan Desa
Rata Agung Kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir Barat)

Skripsi

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Ilmu Syari'ah**



**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1441 H/2020 M**

**IMPLEMENTASI PASAL 12 UNDANG-UNDANG NOMOR 18
TAHUN 2013 TENTANG PENCEGAHAN DAN
PEMBERANTASAN PERUSAKAN HUTAN PERSPEKTIF FIQH
SIYASAH**
(Studi di Hutan Kawasan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan Desa
Rata Agung Kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir Barat)

Skripsi

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-
syarat Guna Memproleh Gelar Sarjana S1 Dalam Ilmu Syariah dan
Hukum**



Pembimbing 1 : Dr. Hj. Zuhraeni, S.H., M.H.

Pembimbing 2 : Dr. Hj. Linda Firdawaty, S.Ag., M.H.

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1441 H/2020 M**

ABSTRAK

Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS) merupakan salah satu nama hutan kawasan yang terletak di Desa Rata Agung Kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir Barat. Hutan Kawasan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan dan dilestarikan keberadaannya sebagai hutan tetap. Perlindungan hutan adalah suatu tindakan untuk mencegah terjadinya kerusakan hutan dan hasil hutan oleh perbuatan manusia maupun alam, yang juga diatur pada Pasal 12 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013. Lalu yang menjadi masalah disini adalah seperti yang kita ketahui bahwa setiap manusia dilarang untuk membuka lahan, membakar hutan dan menebang pohon sembarangan di hutan kawasan tanpa perizinan pemerintah. Namun banyak sekali masyarakat yang membuka lahan di salah satu hutan kawasan yaitu Taman Nasional Bukit Barisan Selatan yang terletak di Desa Rata Agung Kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir Barat. Masyarakat Desa Rata Agung bukan hanya sekedar membuka lahan tetapi masyarakat Desa Rata Agung juga membakar hutan dan menebang pohon sembarangan, akibat dari perbuatan masyarakat tersebut membuat petugas kehutanan sering kali memasuki hutan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan untuk menghentikan perbuatan masyarakat Rata Agung namun selalu gagal. Rumusan Masalah dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimana implementasi Pasal 12 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan di Hutan Kawasan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan Desa Rata Agung. 2) Bagaimana perspektif fiqh siyasah terhadap Implementasi Pasal 12 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Implementasi Pasal 12 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan di Hutan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan serta pandangan fiqh siyasah terhadap pelaksanaan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013. Dilihat dari jenisnya penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang dilakukan langsung pada responden. Dilihat dari sifatnya, penelitian ini bersifat deskriptif yaitu suatu metode dalam penelitian suatu objek yang bertujuan membuat deskripsi (menggambarkan). Data-data yang dapat diambil sebagai rujukan untuk selanjutnya dianalisis secara sistematis untuk menunjang dalam pembahasan. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa: 1. Lemahnya penegakan hukum terhadap masyarakat yang melanggar peraturan yang hanya memberikan keringan tanpa hukuman yang sudah ditetapkan sehingga membuat masyarakat yang membuka lahan perkebunan dalam hutan kawasan tidak merasa jera dan tetap melanggar peraturan yang ada. 2. Dalam pandangan fiqh siyasah terhadap Implementasi Pasal 12 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 belum sesuai karena masyarakat yang membuka lahan perkebunan dalam hutan kawasan merupakan perbuatan yang merusak lingkungan seperti yang terkandung dalam ayat Al-Quran dan Hadist.



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat : Jl. Let. Kol. H: Suratmin-Sukaramo Bandar Lampung Telp (0721) 703260

PERSETUJUAN

Tim pembimbing telah membimbing dan mengoreksi sebagaimana mestinya terhadap skripsi saudara :

Nama Mahasiswa : Revi Puja Sari
NPM : 1621020181
Jurusan : Siyasah (Hukum Tata Negara)
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Judul Skripsi : Implementasi Pasal 12 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Perspektif Fiqh Siyasah (Studi di Hutan Kawasan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan Desa Rata Agung Kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir Barat)

MENYETUJUI

Untuk di munaqasyahkan dan dipertahankan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.

Pembimbing I

Dr. Hj. Zuhraini, S.H., M.H.
NIP. 196505271992032002

Pembimbing II

Dr. Hj. Linda Firdawaty, S.Ag., M.H.
NIP. 197112041997032001

Mengetahui,
Ketua Jurusan Siyasah

Frenki, M.Si
NIP. 198003152009011017



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat : Jl. Let. Kol. H. Suratmin Sukarami Bandar Lampung Telp (0721) 703260

PENGESAHAN

Skripsi, dengan judul “Implementasi Pasal 12 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Perspektif Fiqh Siyasah (Studi di Hutan Kawasan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan Desa Rata Agung Kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir Barat)” Disusun oleh Revi Puja Sari, Npm 1621020181, Jurusan Siyasah syar’iyyah (Hukum Tata Negara), telah diajukan dalam sidang munaqasah Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung Pada hari Selasa, 23 Juni 2020.

TIM DEWAN PENGUJI

Ketua : Agustina Nurhayati, S.Ag. M.II

Sekretaris : Ahmad Burhanuddin, S.H.I., M.H.I

Penguji Utama : Marwin, S.H., M.H

Pembimbing I : Dr. Hj. Zuhraini, S.H., M.H.

Pembimbing II : Dr. Hj. Linda Firdawaty, S.Ag., M.H

**Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah**



Drs. L. Khairuddin, M.H

0221993031002

MOTTO

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا
بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha Melihat. (QS. An-Nissa (4) :58)¹



¹Q.S An-Nissa (4) : 58

PERSEMBAHAN

Dengan segala kerendahan hati mengucapkan Alhamdulillah dan penuh rasa syukur kepada Allah SWT untuk segala nikmat dan kekuatan yang telah diberikan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini, sehingga dengan nikmat-Nya karya ini dapat diselesaikan. Skripsi ini penulis persembahkan sebagai tanda cinta kasih, tanggung jawab dan hormat tak terhingga kepada:

1. Yang terhormat orang tuaku tercinta yang ku sayangi dan kubanggakan ayahanda Aliyansyah dan ibunda Salamah yang telah melahirkanku, merawatku, membesarkanku serta mendidikku dengan penuh cinta dan kasih sayang, menyekolahkanku, berjuang untuk keberhasilanku dengan do'a dan segenap jas-jasa yang tak terbilang demi keberhasilan cita-citaku. Semoga Allah SWT memberikan nikmat-Nya kepada Ayah dan Ibu.
2. Untuk kakak ku yang tersayang Reta Andriyani, S.Pd. dan kakak ipar ku yang tersayang Mat Hirzan Fikri, S.Pd.i. yang tidak pernah bosan memberikan motivasi kepadaku untuk senantiasa semangat dalam menempuh pendidikan dan menggapai cita-cita setinggi-tingginya.
3. Untuk adik-adik ku tersayang Rando Satriyawan dan Relvi Santesa yang selalu mendo'akan dan memberikan dorongan demi keberhasilan skripsi ini.
4. Untuk keponakan ku tersayang Assyfa Navisha kehadiranmu di kehidupan bungah mendatangkan kebahagiaan dan kau adalah salah satu yang membuat bungah bersemangat untuk menggapai cita-cita.
5. Untuk seluruh keluarga besar yang selalu mendukung dan mendo'akan untuk keberhasilanku.

RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama Revi Puja Sari dilahirkan di Desa Rata Agung pada tanggal 5 Januari 1998 merupakan anak kedua dari empat bersaudara yang dilahirkan dari pasangan suami istri Bapak Aliyansyah dan Ibu Salamah.

Penulis menyelesaikan pendidikan di:

1. Sekolah Dasar Negeri 1 Kampung Jawa, Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat lulus tahun 2009
2. Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Tanah Lapang, Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat
3. Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Rawas Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat lulus 2016
4. Pada Tahun 2016 Penulis Melanjutkan Pendidikan Stara 1 di Perguruan Tinggi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Fakultas Syari'ah Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)



KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum wr.wb

Puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga skripsi yang berjudul “ Implementasi Pasal 12 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Perspektif Fiqh Siyasah (Studi Hutan Kawasan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan Desa Rata Agung Kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir Barat), dapat diselesaikan. Shalawat serta salam selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, beserta para keluarga, sahabat, dan para pengikutnya hingga akhir zaman.

Skripsi ini disusun untuk melengkapi tugas dan syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah) Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Dalam proses penyelesaian skripsi ini, diucapkan terimakasih atas bantuan semua pihak. Secara rinci saya ucapkan terima kasih disampaikan kepada:

1. Prof. Dr. H. Moh. Mukri, M,Ag., Rektor UIN Raden Intan Lampung;
2. Bapak Dr. H. Khairuddin, M.H, Dekan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung;
3. Dr. Hj. Zuhraini, S.H. M.H. Pembimbing 1 yang telah meluangkan waktu memberikan arahan dan bimbingan dengan penuh kesabaran sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;

4. Dr. Hj. Linda Firdawaty, S.Ag., M.H. Pembimbing 11 yang telah meluangkan waktu memberikan arahan dan bimbingan dengan penuh kesabaran sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
5. Bapak dan ibu dosen Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung yang tulus dan ikhlas memberikan ilmu pengetahuannya;
6. Pegawai Fakultas Akademik Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung;
7. Pimpinan Perpustakaan UIN Raden Intan Lampung dan pengelola perpustakaan yang telah memberikan informasi, data, referensi, dan lain-lain;
8. Almamater tercinta UIN Raden Intan Lampung.

Semoga kebaikan yang telah diberikan kepada penulis akan mendapatkan balasan dari Allah SWT. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini banyak sekali kekurangan, oleh sebab itu saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat penulis butuhkan untuk menyempurnakannya. Namun demikian, penulis berharap semoga tulisan ini dapat bermanfaat bagi penulis pribadi dan pembaca pada umumnya.

Bandar lampung, 2020

Penulis

Revi Puja Sari
1621020181

DAFTAR ISI

JUDUL.....	i
ABSTRAK	ii
PERSETUJUAN	iii
PENGESAHAN	iv
MOTTO.....	v
PERSEMBAHAN	vi
RIWAYAT HIDUP	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
BAB 1 PENDAHULUAN	
A. Penegasan Judul.....	1
B. Alasan Memilih Judul.....	2
C. Latar Belakang Masalah	3
D. Fokus Masalah	7
E. Rumusan Masalah.....	8
F. Tujuan Penelitian	8
G. Signifikansi Penelitian	9
H. Metode Penelitian	9



BAB 11 KAJIAN TEORI

A. Kajian Teori.....	16
1. Hutan Kawasan Menurut Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013.....	16
a. Pengertian Hutan Kawasan.....	16
b. Peran, Fungsi Hutan Kawasan.....	18
c. Asas-asas atau Prinsip-prinsip Hutan Kawasan	24
d. Sumber Hukum dan Dasar Hukum Hutan Kawasan	31
e. Sanksi Pelanggaran Pasal 12 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013	36
f. Tujuan Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan ..	37
2. fiqh Siyasah.....	39
a. Pengertian Fiqh Siyasah	39
b. Ruang Lingkup Kajian Fiqh Siyasah.....	41
c. Siyasah Dusturiyah.....	43
d. Hutan Kawasan Menurut Fiqh Siyasah	48
B. Tinjauan Pustaka.....	53

BAB 11 DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian.....	57
1. Sejarah Mengenai Hutan Kawasan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan.....	57
2. Keadaan Geografis	58
3. Keadaan Demografi.....	64
4. Keadaan Sosial dan Kemasyarakatan.....	64
B. Deskripsi Data Penelitian	65

BAB IV ANALISIS PENELITIAN

A. Temuan Penelitian	70
B. Pembahasan	71
1. Implementasian Pasal 12 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan di Hutan Kawasan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan Desa Rata Agung Kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir Barat....	71
2. Pandangan Fiqh Siyasah Tentang Implementasi Pasal 12 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.....	74

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	78
B. Rekomendasi.....	79

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN.....



BAB 1

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Guna memperjelas pokok bahasan penulisan skripsi ini, maka perlu penjelasan dengan definisi yang terkandung di dalamnya. Judul skripsi ini adalah **Implementasi Pasal 12 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Perspektif Fiqh Siyash (Study Hutan Kawasan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan Desa Rata Agung Kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir Barat)**. Sebelum menguraikan pembahasan penelitian dengan judul tersebut, terlebih dahulu akan dijelaskan berbagai istilah yang terdapat pada penelitian ini agar tidak menimbulkan kesalahpahaman bagi pembaca. Dalam penegasan judul akan dijelaskan secara umum cakupan penelitian serta membatasi arti kalimat dalam penulisan ini, agar makna yang dimaksud dapat digambarkan dengan jelas.

1. Implementasi, yaitu tindakan-tindakan yang harus dilakukan oleh sekelompok individu yang telah ditunjuk untuk menyelesaikan suatu tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya dibentuk dalam bentuk perintah atau kepastian.²
2. Pasal 12 Undang- Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang berbunyi: setiap orang dilarang

²Dapartemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011), h.529.

membakar hutan tanpa izin, menebang pohon tanpa izin pemerintah, dan membuka lahan perkebunan didalam hutan.³

3. Perspektif adalah suatu tinjauan atau pandangan luas, dalam artian pendapat seseorang atau golongan tentang arti suatu peristiwa, baik dalam keadaan sekarang maupun untuk masa yang akan datang.⁴
4. Fiqh Siyasah adalah salah satu aspek hukum Islam yang membicarakan pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan bagi manusia itu sendiri.⁵

Jadi, yang penulis maksud dari judul skripsi ini adalah penelitian mengenai Implementasi Pasal 12 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (Studi di Hutan Kawasan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan Desa Rata Agung Kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir Barat)

B. Alasan Memilih Judul

Sebagai alasan yang mendorong memilih judul “Implementasi Pasal 12 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Perspektif Fiqh Siyasah (Studi Hutan Kawasan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan Desa Rata Agung Kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir Barat)” adalah sebagai berikut:

³Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, Pasal 12.

⁴Tim Prima Pena, *Kamus Ilmiah Populer* (Edisi Lengkap), Cetakan Pertama (Surabaya: Gita Media Press, 2006), h.371.

⁵Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah, Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Edisi Pertama(Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), h.2.

1. Alasan Objektif

Taman Nasional Bukit Barisan Selatan adalah salah satu nama hutan yang harus dijaga dan dilestarikan tanpa harus merusaknya dan melanggar ketentuan sesuai dengan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013.

2. Alasan Subjektif

Kesesuaian bidang yang diteliti dan tersedianya literatur yang menunjang. Maka sangat memungkinkan untuk melakukan penelitian. Judul tersebut sangat relevan dengan disiplin ilmu yang ditekuni penulis yaitu jurusan Siyasah di Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.

C. Latar Belakang Masalah

Hutan Indonesia sebagai karunia dan anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang diamanatkan kepada bangsa Indonesia merupakan unsur utama sistem penyangga kehidupan manusia dan merupakan modal dasar pembangunan nasional yang memiliki manfaat nyata, baik manfaat ekologi, sosial budaya, maupun ekonomi agar kehidupan dan penghidupan bangsa Indonesia berkembang secara seimbang dan dinamis.⁶ Hubungan manusia di dalam masyarakat berinteraksi tentu ada yang bersifat positif dan negatif, begitu pula hubungan manusia dengan alam, jika bersifat positif tentu akan membawa kebaikan buat alam sekitar dan juga manusia. Sebaliknya jika bersifat negatif akan membawa musibah bahkan kehancuran bagi alam dan juga manusia.⁷ Maka dalam hal ini kehadiran suatu negara atau

⁶H. Joni, *Hukum Lingkungan Kehutanan* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), h.368.

⁷Rahmadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), h.11.

konstitusi sangat dibutuhkan untuk mengatur semua kegiatan yang ada, seperti halnya dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Pasal 12 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Undang-Undang ini merupakan salah satu peraturan Perundang-undangan kehutanan yang dibuat pada era reformasi. Hutan sebagai karunia dan amanah Tuhan Yang Maha Esa yang dianugerahkan kepada bangsa Indonesia merupakan kekayaan yang dikuasai oleh negara, memberikan manfaat serbaguna bagi umat manusia karenanya wajib disyukuri, diurus dan dimanfaatkan secara optimal serta dijaga kelestariannya untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat bagi generasi sekarang maupun yang akan datang.⁸ Seperti melakukan kegiatan perlindungan hutan dan kawasan hutan merupakan salah satu kegiatan yang sangat penting dan utama karena fakta menunjukkan bahwa kerusakan hutan di Indonesia telah masuk pada skala yang sangat mengkhawatirkan dan karenanya sangat pantas apabila pemerintah sangat menaruh perhatiannya terhadap perlindungan hutan.⁹

Pasal 12 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 telah menjelaskan berbagai larangan-larangan yang tidak boleh dilakukan untuk menjaga kelestarian hutan seperti diantaranya:

- a. Melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan hutan;
- b. Melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang;

⁸Salim, *Dasar-Dasar Hukum Kehutanan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2003), h.37.

⁹Supriadi, *Hukum Kehutanan dan Hukum Perkebunan di Indonesia* (jakarta: PT. Sinar Grafika, 2010), h.385.

- c. Melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah;
- d. Memuat, membongkar, mengeluarkan, meengangkut, mengusai, dan/atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin;
- e. Membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk melakukan kegiatan perkebunan dan/atau mengakut hasil kebun di dalam kawasan hutan tanpa izin Menteri;
- f. Melakukan kegiatan perkebunan tanpa izin Menteri di dalam kawasan hutan;
- g. Mengedarkan kayu hasil pembalakan liar melalui darat, perairan, atau udara;
- h. Menyeludupkan kayu yang berasal dari atau masuk ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui sungai, darat, laut, atau udara;
- i. Menerima, menjual, membeli, menerima tukar, menerima titipan, dan/atau memiliki hasil hutan yang diketahui berasal dari pembalakan liar;
- j. Membeli, memasarkan, dan/atau mengolah hasil kayu yang berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah;
- k. Menerima, menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, dan/atau memiliki hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah;

Namun, berdasarkan penelitian di lapangan yaitu masyarakat Desa Rata Agung belum semuanya mematuhi peraturan yang berisi larangan yang tercantum dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013. Buktinya meskipun masyarakat setempat mengetahui bahwa tanah di kawasan tersebut bukan milik

pribadi melainkan milik negara masyarakat Desa Rata Agung sampai saat ini masih melakukan penebangan pohon secara ilegal yang hasil penebangannya akan dipergunakan untuk kepentingan pribadi seperti dipergunakan untuk membangun rumah atau untuk diperjual belikan, bukan hanya itu saja masyarakat setempat membakar hutan tanpa izin agar lokasi tersebut dapat dipergunakan untuk membuka lahan perkebunan.

Sumber daya hutan merupakan salah satu ciptaan Tuhan Yang Maha Kuasa yang memiliki peranan sangat penting dalam menjaga keseimbangan alam di jagad raya ini.¹⁰ Sebab di dalam hutan telah diciptakan segala mahluk hidup baik besar, kecil, maupun yang tidak dapat dilihat oleh mata yang harus tetap hidup dan dilindungi. Tetapi, akibat dari perbuatan manusia kehidupan mereka pun ikut terancam.¹¹ Perlindungan dan Pengawet Alam (PPA) merupakan salah satu nama lembaga yang membantu POLHUT (Polisi Hutan) melakukan razia terhadap masyarakat yang membuka kawasan di tempat tersebut. Tetapi masyarakat setempat selalu membantah dan selalu lolos setiap dilakukannya razia. Seharusnya masyarakat menyadari bahwa perbuatan tersebut akan mengakibatkan kerusakan pada hutan dan merugikan masyarakat setempat.

Dalam agama Islam pun setiap mahluk hidup di bumi dilarang melakukan kerusakan di muka bumi. Fiqh siyasah sebagai salah satu hukum Islam yang membicarakan pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara

¹⁰Transtoto Handadhari, *Kepedulian yang Terganjil. Menguak Belantara Masalah Kehutanan Indonesia* (Jakarta: Kompas Gramedia, 2009), h.210.

¹¹Bambang Pamulardi, *Hukum Kehutanan dan Pembangunan Bidang Kehutanan* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), h. 94.

demikian mencapai kemaslahatan manusia itu sendiri.¹² Islam diturunkan untuk mengajarkan kita untuk saling menghargai satu dengan yang lain baik sesama muslim maupun non-muslim bahkan didalam Islam mengajarkan untuk merawat dan menjaga semua yang ada di bumi ini termasuk menjaga hutan agar tidak menimbulkan kerusakan hutan yang akan menimbulkan kerugian pada masyarakat setempat.

Dalam Al-Quran surat Al-Baqoroh ayat 205, Allah SWT telah befirman yang berbunyi:

وَإِذَا تَوَلَّى سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ ۗ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ
الْفُسَادَ



“Dan apabila ia berpaling (dari kamu), ia berjalan di bumi untuk mengadakan kerusakan padanya, dan merusak tanam-tanaman dan binatang ternak, dan Allah tidak menyukai kebinasaan”[205].

Berdasarkan latar belakang diatas perlu diadakan penelitian lebih lanjut tentang Implementasi Pasal 12 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 di Desa Rata Agung Kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir Barat, karena kenyataan yang ada menunjukkan bahwa dengan adanya peraturan tertulis saja tanpa adanya tindakan seperti sanksi pidana yang diterapkan itu tidak akan membuat masyarakat berhenti membuat kerusakan pada hutan tersebut.

¹²Ahmad Syafii Maarif, *Islam dan Masalah Kenegaraan* (Jakarta: LP3ES, 1985), h.40.

D. Fokus Penelitian

Penelitian ini fokus pada Implementasi Pasal 12 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Perspektif Fiqh Siyasah yang didalamnya berisi larangan-larangan merusak hutan. Namun, yang terjadi dilapangan yaitu di Desa Rata Agung belum terlaksana sesuai dengan isi Pasal 12 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tersebut. Masyarakat Desa Rata Agung masih saja membakar hutan, menebang pohon, dan menggunakan hutan kawasan tersebut sebagai lahan perkebunan.

E. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Implementasi Pasal 12 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan di Hutan Kawasan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan Desa Rata Agung?
2. Bagaimana Perspektif Fiqh Siyasah Terhadap Implementasi Pasal 12 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan?

F. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui Implementasi Pasal 12 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan di Hutan Kawasan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan Desa Rata Agung.

- b. Untuk menganalisis perspektif fiqh siyasah terhadap Pasal 12 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan .

G. Signifikansi Penelitian

- a. Secara teoritis, diharapkan penelitian untuk memberikan pemahaman bagi pembaca mengenai Implementasi Pasal 12 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan perspektif fiqh siyasah, sebagai wujud dari disiplin ilmu yang dipelajari dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan hukum, khususnya Hukum Tata Negara (Siyasah).
- b. Secara praktis, diharapkan penelitian ini dapat menjadi bahan pemikiran yang positif bagi peneliti dan khususnya bagi pembaca pada umumnya yaitu tentang Implementasi Pasal 12 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan di Hutan Kawasan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan Desa Rata Agung Kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir Barat.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu cara atau jalan yang digunakan dalam mencari, menggali, mengelola dan membahas data dalam suatu penelitian untuk memperoleh hasil pemecahan dari suatu permasalahan.

Dalam penelitian penulis menggunakan metode-metode sebagai berikut:

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*Field Research*), yaitu penelitian yang langsung dilakukan dilapangan atau pada responden.¹³

Yakni terjun langsung ke lokasi Hutan Kawasan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan yang menjadi objek penelitian lapangan.

b. Sifat penelitian

Penelitian yang dipakai penulis dalam menyusun skripsi ini adalah Deskriptif yaitu metode penelitian dengan mengumpulkan data-data yang disusun dijelaskan diuraikan dan disimpulkan. Penelitian deskriptif yaitu suatu penelitian yang mempelajari masalah-masalah dalam masyarakat serta situasi-situasi, termasuk tentang hubungan, kegiatan-kegiatan, sikap-sikap, serta proses-proses yang sedang berlangsung dan pengaruh-pengaruh suatu fenomena.¹⁴

2. Sumber data

a. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh dari sumber pertama baik dari individu atau perseorangan seperti hasil dari wawancara atau hasil

¹³Susiadi, *metode penelitian* (lampung: pusat penelitian dan penerbitan LP2M institut agama islam negeri raden intan lampung, 2015), h. 12.

¹⁴*Ibid.*, h.16.

pengisian kuesioner yang dilakukan oleh peneliti.¹⁵ Dalam penelitian ini yang dimaksud data primer adalah semua data yang diperoleh dari Hutan Kawasan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan.

b. Data Sekunder

Data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada.¹⁶ Dalam penelitian ini yang dimaksud data sekunder adalah data-data dapat diperoleh dari buku-buku ataupun bahan-bahan dari internet seperti peraturan-perundang-undangan serta bahan-bahan lainnya yang mempunyai hubungan dengan masalah lingkungan dan ayat-ayat yang terkait dengan hukum lingkungan.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah totalitas atau jumlah dari keseluruhan subjek penelitian.¹⁷

Objek atau nilai yang akan diteliti dalam populasi dapat berupa orang, perusahaan, lembaga, media, dan sebagainya. Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini berjumlah 110 orang yang menempati lahan hutan kawasan di Desa Rata Agung.

b. Sampel

Sampel adalah bagian atau wakil dari populasi. Sampel yang dipakai dalam penelitian ini adalah *Proposive Sampling* adalah pemilihan sekelompok

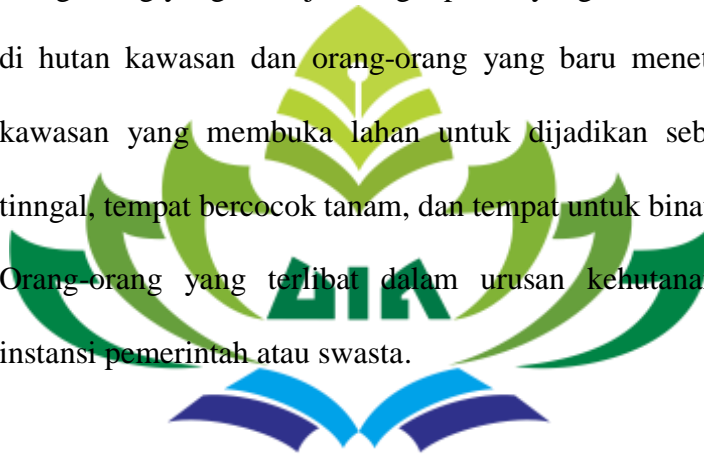
¹⁵Husein Umar, *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), h.41.

¹⁶*Ibid.*, h.42.

objek didasarkan atas ciri-ciri atau sifat-sifat populasi yang sudah diketahui sebelumnya.¹⁸ Sampel dalam penelitian ini adalah Ketua Dinas Kehutanan, Anggota Polisi Hutan, Kepala Desa, Tokoh Masyarakat, 7 orang masyarakat Desa Rata Agung yang sudah lama menempatkan lahan dan masyarakat yang baru menempatkan lahan.

Berdasarkan pendapat diatas,kriteria untuk menjadi sampel dalam penelitian ini adalah:

1. orang-orang yang bekerja sebagai petani yang sudah lama menetap di hutan kawasan dan orang-orang yang baru menetap di hutan kawasan yang membuka lahan untuk dijadikan sebagai tempat tinggal, tempat bercocok tanam, dan tempat untuk binatang ternak.
2. Orang-orang yang terlibat dalam urusan kehutanan baik dari instansi pemerintah atau swasta.



4. Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data primer pengumpulan data melalui:

a. Observasi

Observasi adalah pemilihan, pengubahan pencatatan, dan pengodean serangkaian perilaku dan suasana yang berkenaan dengan kegiatan observasi, sesuai dengan tujuan-tujuan empiris.

¹⁶Sunarsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*(Jakarta: PT Rineka Cipta, 2014), h.173.

¹⁸*Ibid.*, h.147.

b. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan langsung oleh pewawancara kepada responden, dan jawaban-jawaban responden dicatat atau direkam. Bentuk wawancara yang digunakan dalam wawancara adalah wawancara tidak berstruktur, yaitu dimana pewawancara tidak menggunakan daftar pertanyaan atau daftar isian sebagai penuntun selama dalam proses wawancara. Wawancara dilakukan pada anggota petugas kehutanan dan masyarakat Desa Rata Agung Kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir Barat

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan pada subjek peneliti, namun melalui dokumen. Dokumen yang digunakan dapat berupa buku harian, surat pribadi, laporan notulen rapat, catatan kasus dalam pekerjaan sosial dan dokumen lainnya. Pelaksanaannya dengan menggunakan catatan baik berupa arsip-arsip atau dokumentasi, maupun keterangan yang berhubungan.¹⁹ Dokumentasi yang digunakan peneliti dapat berupa dokumen data-data dari Desa Rata Agung ataupun data dari lembaga-lembaga yang terkait dengan pokok masalah yang peneliti ambil.

Sedangkan untuk memperoleh data sekunder melalui studi pustaka (*Library research*). Studi pustaka adalah kegiatan yang dilakukan dengan maksud untuk memperoleh arah pemikiran dan tujuan penelitian yang dilakukan dengan cara

¹⁹*Ibid.*, h.158-170.

membaca, mempelajari, mengutip, dan menelaah literatur-literatur yang menunjang.²⁰ Dalam studi pustaka ini data-data dapat diperoleh melalui buku-buku ataupun bahan-bahan dari internet seperti peraturan-perundang-undangan serta bahan-bahan lainnya yang mempunyai hubungan dengan masalah lingkungan dan ayat-ayat yang terkait dengan hukum lingkungan.

5. Pengolahan Data

Data-data yang telah terkumpul diolah dengan cara:

- a. Pemeriksaan Data (*Editing*) adalah pengecekan atau pengoreksian data yang telah dikumpulkan, karena kemungkinan data yang telah masuk (*raw data*) atau data terkumpul itu tidak logis dan meragukan.²¹
- b. Rekonstruksi Data (*Reconstructing*) yaitu menyusun ulang secara teratur, berurutan, dan logis sehingga mudah dipahami sesuai dengan permasalahan yang ada kemudian ditarik kesimpulan sebagai tahap akhir dalam suatu proses penelitian.²²
- c. Sistematis Data yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematika bahan berdasarkan urutan masalah.²³

²⁰M.Iqbal Hasan, *Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya* (Jakarta : Ghalia Indonesia, 2002), h.82.

²¹*Ibid.*, h.83.

²²Amruddi dan Zainal Arifin Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), h.321.

²³Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian* (Bandung: PT. Citra Aditya Bhakti, 2004), h.45.

6. Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis kualitatif yaitu, berupa prosedur yang menghasilkan data deskriptif, yaitu suatu gambaran yang melukiskan secara sistematis fakta atau karakteristik populasi tertentu secara aktual dan cermat. Metode ini disesuaikan dengan kajian penelitian, yaitu Implementasi Pasal 12 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan perspektif fiqh siyasah. Kemudian ditarik kesimpulan yang merupakan suatu jawaban dan permasalahan pokok yang diangkat dalam penelitian ini dengan menggunakan cara berfikir induktif, yaitu berfikir induktif berangkat dari fakta-fakta khusus, peristiwa-peristiwa yang kongkrit, kemudian dari fakta-fakta atau peristiwa yang khusus itu ditarik generalisasi-generalisasi mempunyai sifat umum.²⁴ Jadi dengan cara berfikir induktif ini adalah suatu cara atau jalan untuk mengambil kesimpulan yang beranjak dari fakta-fakta yang telah dikumpulkan dari bagian-bagian yang bersifat khusus dan dipadukan untuk menarik kesimpulan. Dalam penelitian ini berfikir induktif adalah perangkat dari data-data yang ada di Desa Rata Agung kemudian dikaitkan dengan teori-teori yang membahas tentang lingkungan kemudian ditarik kesimpulan secara umum.

²⁴Sutrisno Hadi, *Metode Research*, Jilid 1, (Jakarta: Andi Obset, 1990), h.24.

BAB 2 KAJIAN TEORI

A. Kajian Teori

1. Hutan Kawasan Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013

a. Pengertian Hutan Kawasan

Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam komunitas alam lingkungannya yang tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lainnya. Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.²⁵ Kawasan-kawasan hutan, seluruhnya merupakan wilayah-wilayah yang telah ditetapkan penggunaannya di bidang kehutanan yang didasarkan pada kebutuhan serta kepentingan masyarakat Indonesia. Hutan menyajikan berbagai macam barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang digunakan untuk sesuatu yang bermanfaat dan tidak merugikan banyak orang.²⁶

Kawasan hutan adalah wilayah-wilayah tertentu ditetapkan pemerintah untuk dipertahankan sebagai kawasan hutan tetap. Selanjutnya, kawasan hutan adalah wilayah yang sudah berhutan atau yang tidak berhutan kemudian ditetapkan penguasaannya bagi negara. Kawasan-kawasan hutan, seluruhnya merupakan wilayah-wilayah yang dalam *land use*


²⁵Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, Pasal 12.

²⁶Hasanu Simon, *Hutan Jati dan Kemakmuran* (Yogyakarta: Bigraf Publishing, 200), h.11-12.

planning (perencanaan penggunaan lahan) telah/akan ditetapkan penggunaannya di bidang kehutanan yang didasarkan pada kebutuhan serta kepentingan masyarakat Indonesia.

Dalam pengertian secara luas dikandung makna bahwa pada setiap kawasan hutan tidak selalu diartikan keseluruhan wilayahnya berhutan. Termasuk, tanah yang tidak berhutan pun dapat ditunjuk menjadi kawasan hutan. Sebaliknya, suatu kawasan hutan dapat diubah status hukumnya menjadi bukan kawasan hutan karena adanya berbagai kepentingan dan penggunaan yang dianggap sah oleh pemerintah melalui persetujuan menteri kehutanan.²⁷

Dari definisi dan penjelasan tentang kawasan hutan, terdapat unsur-unsurnya meliputi:

- 
- a. Suatu wilayah tertentu
 - b. Terdapat hutan atau tidak terdapat hutan
 - c. Ditetapkan pemerintah (menteri) sebagai kawasan hutan
 - d. Didasarkan pada kebutuhan serta kepentingan masyarakat

Dari unsur pokok yang terkandung dalam definisi kawasan hutan, dijadikan dasar pertimbangan ditetapkannya wilayah-wilayah tertentu sebagai kawasan hutan.²⁸

Hutan adalah bentuk kehidupan yang tersebar diseluruh dunia. Kita dapat menemukan hutan baik di daerah tropis maupun daerah beriklim dingin, di

²⁷Alam Setia Zain, *Hukum Lingkungan Konservasi Hutan* (jakarta: PT. Rineka Cipta, 1997), h.2.

²⁸*Ibid.*, h.3.

dataran rendah maupun di pegunungan, di pulau kecil maupun di benua besar. Hutan merupakan suatu kumpulan tetumbuhan, terutama pepohonan atau tumbuhan yang berkayu lain, yang menempati daerah yang cukup luas.²⁹ Hutan juga sebagai bagian dari sumber daya alam nasional memiliki arti dan peranan penting dalam berbagai aspek kehidupan sosial, pembangunan dan lingkungan hidup. Telah diterima sebagai kesepakatan internasional, bahwa hutan yang berfungsi penting bagi kehidupan dunia, harus dibina dan dilindungi dari berbagai tindakan yang berakibat rusaknya ekosistem dunia, karena hutan memiliki berbagai manfaat bagi kehidupan yaitu berupa manfaat langsung yang dirasakan dan manfaat yang tidak langsung.³⁰



b. Peran, Fungsi dan Jenis-jenis hutan

Peranan hutan dalam mendukung perkembangan peradaban manusia di muka bumi ini sangatlah besar, sehingga hutan dikatakan sebagai otot peradaban manusia (*the sinew of civilization*). Dalam kaitannya dengan peranan hutan dalam mendukung kehidupan manusia di muka bumi ini, kita pun dalam menilai peranan hutan dalam mendukung kehidupan manusia pada skala yang lebih khusus, yaitu untuk kepentingan pembangunan di Indonesia. Kita mengetahui bahwa sebagai pemanfaatan hutan alam ada yang tidak terkendali telah berdampak negatif terhadap lingkungan hidup.

²⁹Abdul Muis Yusuf, Mohammad Taufik Makarao, *Hukum Kehutanan di Indonesia* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2011), h.19.

³⁰Alam Setia Zain, *Aspek Pembinaan Hutan dan Stratifikasi Hutan Rakyat Cetakan Pertama* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1998), h.2.

Dampak negatif tersebut dapat berupa rusaknya hutan alam sehingga mengakibatkan terjadinya penurunan produktivitas dan kualitas hutan.³¹

Dalam keadaan asli yang terbentuk secara alami, setiap kesatuan hamparan lahan yang terdapat dalam suatu bentang alam ekologis dapat berwujud beraneka ragam, misalnya berupa hutan, padang rumput, savana, gurun, sungai, dan lahan bebatuan tanpa tumbuhan apa pun.³²

Dalam pengelolaan hutan perlu memperhatikan beberapa fungsi diantaranya:

1) Fungsi Ekonomi

Manyarakat disekitar hutan dapat menikmati hasil dari hutan yang mereka kelola dengan harapan ada peningkatan ekonomi yang stabil dan menciptakan lapangan pekerjaan bagi generasi mendatang dengan polapeningkatan pengelolaan hutan yang berteknologi ramah lingkungan.

2) Fungsi Sosial

Terciptanya solidaritas masyarakat sekitar hutan dan menghindari kesenjangan sosial diantara kelompok masyarakat, maka dalam hal ini pengelolaan hutan dilakukan secara kolektif.

3) Fungsi Ekologi

Hutan berfungsi sebagai konservasi, untuk mencegah terjadinya banjir, longsor, kekeringan, dan kebakaran serta memberikan

³¹Endang Suhendang, *Pengantar Ilmu Kehutanan* Cetakan Pertama, (Bogor: IPB Press, 2018), h.109.

³²Ibid., h.112.

perlindungan terhadap masyarakat disekitarnya (dari segi keamanan dan kesehatan).³³

Hutan menjadi modal bagi hidup dan kehidupan makhluk hidup, utamanya bagi manusia. Hutan yang diusahakan dapat memberikan manfaat ekonomi bagi negara untuk kesejahteraan manusia. Hutan juga memiliki fungsi sebagai salah satu penentu sistem penyangga kehidupan manusia, tidak hanya dalam tataran lokal dan nasional namun pula secara global.³⁴ Hutan dengan berbagai fungsinya seperti yang telah disebutkan di atas, telah menjadi rahmat bagi konsumsi kebutuhan. Dimulai pertama setelah Indonesia membuka kebijakan ekonomi di bidang investasi dalam skala yang lebih besar. Investasi yang terutama dikejar dan diarahkan pemerintah ialah dibidang penggarapan sumber-sumber alam, dengan alasan potensial yang cukup tinggi yang dimiliki negara kita, utramasektor pertambangan dan kehutanan.³⁵

Fungsi hutan adalah kedudukan dan tugas hutan sebagai suatu ekosistem dalam suatu kesatuan yang lebih luas dari wilayah bentang alam ekologis tempat hutan berada. Jadi, pengertian fungsi hutan dengan demikian selalu merujuk kepada pengertian kedudukan dan tugas hutan sebagai satu kesatuan ekosistem dalam suatu kesatuan yang lebih luas dari ekosistem hutan tersebut, bukan dalam posisinya sebagai ekosistem

³³Andhiprasetyo, *Pengelolaan Hutan System Masyarakat*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), h.40.

³⁴Ahmad Redi, *Hukum Sumber Daya Alam Dalam Sektor Kehutanan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), h.53.

³⁵Perpustakaan Nasional, *Hutan, Lingkungan dan Paradigma Pembangunan*, (Jakarta: Pancuran Alam, 2007), h.18-19.

hutan yang berdiri sendiri dan terpisah dari ekosistem sumber daya alam yang lainnya.³⁶

Dari segi fungsinya juga hutan memiliki berbagai macam fungsi diantaranya adalah:


- a) Hutan produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan.
- b) Hutan lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah.
- c) Hutan konservasi adalah kawasan hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya.
Tujuan konservasi ini adalah mengusahakan terwujudnya kelestarian sumber daya alam hayati serta keseimbangan ekosistemnya sehingga dapat lebih upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan mutu kehidupan manusia.
- d) Kawasan hutan suaka alam adalah hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya, yang juga berfungsi sebagai wilayah sistem penyangga kehidupan.

³⁶*Ibid.*, h.106.

e) Kawasan hutan pelestarian alam adalah hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.

Selain manfaat yang diambil, hutan juga banyak digunakan dengan dalih manfaat yang sebenarnya merupakan tindakan yang dapat merusak hutan. Ada pula faktor-faktor penyebab kerusakan hutan.

Faktor-faktor yang menyebabkan kerusakan hutan antara lain sebagai berikut:

- 
- a. Kerusakan hutan karena perbuatan manusia secara sengaja
 - b. Kerusakan hutan karena hewan dan lingkungan
 - c. Kerusakan hutan karena serangan hama dan penyakit.

Kerusakan yang terjadi pada hutan lebih dominan dikarenakan oleh faktor yang pertama. Dimana banyak hutan yang dikelola dengan tidak baik, penebangan pohon secara ilegal, pembakaran hutan, dan penangkapan ekosistem hutan secara ilegal oleh orang-orang yang tidak bertanggungjawab.

Hutan dapat dibagi dalam beberapa jenis diantaranya, yaitu:

(1) Hutan menurut kepemilikannya

Ada dua jenis hutan menurut kepemilikannya, yaitu:

- (a) Hutan negara yang merupakan kawasan hutan dan hutan alam yang tumbuh di atas tanah yang bukan hak milik. Selain

pengertian itu, yang juga merupakan hutan negara adalah hutan alam atau hutan tanam di atas tanah yang diberikan kepada daerah tingkat II, dan diberikan dengan hak pakai atau hak pengelolaan.

- (b) Hutan milik, yaitu hutan yang tumbuh di atas tanah hak milik. Hutan jenis ini disebut hutan rakyat. Yang dapat memiliki dan menguasai hutan milik, adalah orang (baik perorangan maupun bersama-sama dengan orang lain), dan atau badan hukum.

(2) Hutan Menurut Fungsinya

Dari segi fungsinya hutan dibedakan menjadi empat golongan, yaitu:

- (a) Hutan Lindung, kawasan hutan, dan karena sifat alam yang digunakan untuk mengatur tata air, mencegah terjadinya banjir dan erosi, dan memelihara kesuburan tanah.
- (b) Hutan Produksi, yaitu kawasan hutan untuk memproduksi hasil, yang dapat memenuhi keperluan masyarakat pada umumnya, pembangunan industri, keperluan ekspor.
- (c) Hutan Suaka Alam, yaitu kawasan hutan yang keadaan alamnya sedemikian rupa, sangat penting bagi ilmu pengetahuan dan teknologi. Ada dua jenis hutan suaka alam, yaitu kawasan hutan yang dengan keadaan alam yang khas, termasuk flora dan fauna diperuntukkan bagi kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan hutan suaka margasatwa, yaitu kawasan hutan untuk tempat

hidup margasatwa (binatang liar) yang mempunyai nilai khas bagi ilmu pengetahuan dan kebudayaan, dan merupakan kekayaan dan kebanggaan nasional.

- (d) Hutan Wisata, yang merupakan kawasan wisata yang diperuntukkan secara khusus, dan dibina dan dipelihara bagi kepentingan pariwisata, dan atau wisata baru.

(3) Hutan Menurut Peruntukannya

Menurut peruntukannya, hutan digolongkan menjadi tiga jenis yaitu:

- (a) Hutan Tetap, yaitu hutan baik yang sudah ada, yang akan ditanami, maupun yang tumbuh secara alami di dalam kawasan hutan
- (b) Hutan Cadangan, yaitu hutan yang berada diluar kawasan hutan yang peruntukannya belum ditetapkan, dan bukan hak milik. Apabila diperlukan hutan cadang ini dapat dijadikan hutan tetap
- (c) Hutan Lainnya, yaitu hutan yang berada diluar kawasan hutan dan hutan cadangan, misalnya hutan yang terdapat pada tanah milik, atau tanah yang dibebani hak lainnya.³⁷

c. Asas-asas atau Pinsip-prinsip Hutan Kawasan

Sebelum membicarakan asas hukum kehutanan perlu dikemukakan pengertian asas hukum. Menurut Van Eikema Hommes asas hukum itu tidak

³⁷Salim, *Dasar-Dasar Hukum Kehutanan* Edisi Revisi Cetakan Pertama (Jakarta: Sinar Grafika, 2003), h.42-43.

boleh dianggap sebagai norma hukum konkret. Akan tetapi, perlu dipandang sebagai dasar umum atau petunjuk bagi hukum yang berlaku.

Prof . Dr. R.M. Sudikno Mertokusumo, S.H. mengemukakan bahwa yang disebut dengan asas hukum bukanlah kaidah hukum konkret, melainkan merupakan latar belakang peraturan yang konkret dan yang bersifat umum dan abstrak.³⁸ Untuk menemukan asas-asas hukum tersebut harus dicarifikasi umum dalam kaidah atau peraturan konkret. Hal ini berarti menunjuk pada kesamaan yang terdapat dalam ketentuan yang konkret itu.

Dari hasil analisis terhadap berbagai peraturan perundang-undangan kehutanan, dapat dikemukakan asas-asas hukum kehutanan yang paling menonjol berikut ini:

1. Asas Manfaat

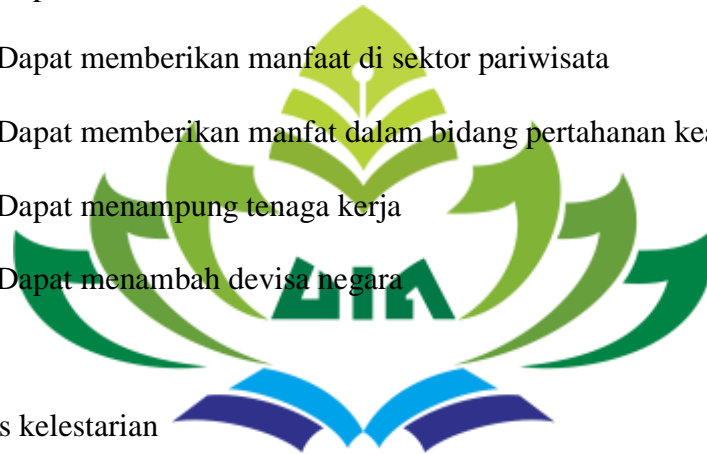
Asas manfaat mengandung makna bahwa pemanfaatan sumber daya hutan harus dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya untuk untuk kemakmuran rakyat banyak. Manfaat itu dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu langsung dan tidak langsung. Manfaat langsung, adalah manfaat yang dapat dirasakan/dinikmati secara langsung oleh masyarakat, yaitu masyarakat dapat memanfaatkan dan menggunakan hasil hutan, antara lain kayu yang merupakan hasil utama hutan, serta berbagai hasil hutan lainnya seperti rotan, getah, buah-buahan, madu dan lain-lain. Manfaat tidak langsung, adalah manfaat yang tidak langsung dinikmati oleh masyarakat, tetapi yang dapat dirasakan adalah

³⁸Abdul Muiz Yusuf, *Hukum Lingkungan Konservasi Hutan* (Jakarta: PT.Rineka Cipta, 2011), h.13.

keberadaan hutan itu sendiri. Seperti dapat mengatur tata air, dapat mencegah terjadinya erosi, dapat memberikan manfaat terhadap kesehatan, dan lain-lain.

Ada delapan manfaat hutan secara tidak langsung, seperti berikut ini:

- 1) Dapat mengatur tata air
- 2) Dapat mencegah terjadinya erosi
- 3) Dapat memberikan manfaat terhadap kesehatan
- 4) Dapat memberikan rasa keindahan
- 5) Dapat memberikan manfaat di sektor pariwisata
- 6) Dapat memberikan manfaat dalam bidang pertahanan keamanan
- 7) Dapat menampung tenaga kerja
- 8) Dapat menambah devisa negara



2. Asas kelestarian

Asas kelestarian mengandung pengertian bahwa pemanfaatan sumber daya hutan harus senantiasa memperhatikan kelestarian sumber daya alam hutan agar mampu memberikan manfaat yang terus-menerus.

Tujuan asas kelestarian hutan, adalah:

- a. Agar tidak terjadi penurunan atau kekosongan produksi (*production gap*) dari jenis kayu perdagangan (*commercial treespecies*) pada rotasi (*culting cyle*) yang berikut, dan seterusnya

- b. Untuk penyelamatan tanah dan air (*soil and wter conservation*)
- c. Untuk perlindungan alam

3. Asas perusahaan

Asas perusahaan adalah pengusaha harus mampu memberikan keuntungan finansial yang layak.

4. Asas Perlindungan Hutan

Asas perlindungan hutan adalah suatu asas yang setiap orang/badan hukum harus ikut berperan serta untuk mencegah dan membatasi kerusakan hutan dan hasil hutan yang disebabkan oleh perbuatan manusia dan ternak, daya-daya alam, hama, dan penyakit.³⁹

Kelima asas penyelenggaraan kehutanan dijelaskan sebagai berikut:

1) *Asas Manfaat dan Lestari*

Asas manfaat dan lestari dimaksudkan agar setiap pelaksanaan penyelenggaraan kehutanan memperhatikan keseimbangan dan kelestarian unsur lingkungan, sosial budaya, serta ekonomi.

2) *Asas Kerakyatan dan Keadilan*

Asas kerakyatan dan keadilan dimaksudkan agar setiap penyelenggaraan kehutanan harus memberikan peluang dan kesempatan yang sama kepada semua warga negara sesuai dengan kemampuannya sehingga dapat meningkatkan kemakmuran seluruh

³⁹Salim, *Dasar-Dasar Hukum....*, h.8-9.

rakyat. Oleh karena itu, dalam pemberian wewenang pengelolaan atau izin pemanfaatan hutan harus dicegah terjadinya praktek *monopoli*, *monopsoni*, *oligopoli*, dan *oligopsoni*.

Yang dimaksud dengan praktek *monopoli*, adalah pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasainya produksi dan atau pemasaran atas barang dan jasa tertentu sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum. *Monopsoni* adalah penerimaan atau menjadi pembeli tunggal atas barang dan jasa dalam pasar yang bersangkutan yang dapat mengakibatkan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat. *Oligopoli* adalah produsen barang dan atau jasa hanya berjumlah sedikit sehingga mereka atau seorang darimereka dapat mempengaruhi harga pasar. Sedangkan yang dimaksud dengan *oligopsoni* adalah secara bersama-sama menguasai pembeli atau penerimaan pasokan agar dapat mengendalikan harga atas barang dan jasa dalam pasar yang bersangkutan, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli atau persaingan tidak sehat.

3) Asas Kebersamaan

Asas kebersamaan dimaksudkan agar dalam penyelenggaraan kehutanan menerapkan pola usaha bersama sehingga terjalin keterkaitan dan saling ketergantungan secara sinergis antara masyarakat setempat dengan BUMN atau BUMD, dan BUMS

Indonesia, dalam rangka pemberdayaan usaha kecil, menengah, dan koperasi.


4) *Asas Keterbukaan*

Asas keterbukaan dimaksudkan agar setiap kegiatan penyelenggaraan kehutanan mengikutsertakan masyarakat dan memperhatikan aspirasi masyarakat.

5) *Asas Keterpaduan*

Asas keterpaduan dimaksudkan agar setiap penyelenggaraan kehutanan dilakukan secara terpadu dengan memperhatikan kepentingan nasional, sektor lain, dan masyarakat setempat.⁴⁰

Di samping asas yang dikemukakan di atas, dikenal juga asa lain yang berlaku secara internasional, yaitu

- 
- a) *Asas ecolabelling* adalah suatu asas dimana semua kayu tropis yang dijual harus berasal dari hutan lestari melalui mekanisme pelabelan.
 - b) Asas berkelanjutan adalah suatu asas dimana setiap negara dapat mengelola secara berkelanjutan dan meningkatkan kerjasama internasional dalam pelestarian hutan dan pembangunan berkelanjutan.

Dalam bidang kehutanan ada sepuluh tindakan yang harus dilakukan oleh setiap negara, yaitu

⁴⁰*Ibid.*, h.9-11.

- (1) Menyediakan wilayah permanen untuk hutan alami dan hutan modifikasi di setiap negara dan mengelolanya sedemikian agar memenuhi kebutuhan semua sektor masyarakat.
- (2) Menyelenggarakan sistem hutan cagar alam yang komprehensif.
- (3) Menyelenggarakan dan mempertahankan daerah hutan modifikasi yang permanen
- (4) Menambah luas hutan buatan
- (5) Meningkatkan kapasitas nasional untuk mengelola hutan secara berkelanjutan
- (6) Menggalakkan keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan hutan
- (7) Meluaskan upaya melestarikan sumber-sumber daya genetik hutan
- (8) Menciptakan pasar bagi produk hutan dari sumber yang dikelola secara berkelanjutan dan menggunakan kayu secara efisien
- (9) Memanfaatkan harga dasar untuk merefleksikan harga kayu yang sesungguhnya
- (10) Menaikkan kapasitas negara-negara berpenghasilan rendah untuk mengelola hutan secara berkelanjutan dan



meningkatkan kerja sama internasional dalam pelestarian hutan dan pembangunan berkelanjutan.⁴¹

d. Sumber Hukum dan Dasar Hukum Hutan Kawasan

Menurut Willem Zevenbergen, sumber hukum adalah tempat untuk menemukan dan menggali hukum. Sementara itu C.S.T. Kansil mengemukakan bahwa sumber hukum adalah segala apa saja yang menimbulkan aturan-aturan yang mempunyai kekuatan yang bersifat memaksa, yakni aturan-aturan yang kalau dilanggar mengakibatkan sanksi yang tegas dan nyata. Di samping kedua pendapat tersebut, menurut Algra, sumber hukum ada dua, yaitu sumber hukum materiil dan sumber hukum formil.⁴²

1) Sumber Hukum Materiil

Sumber hukum materiil memiliki kandungan atau isi dari sebuah peraturan perundang-undangan. Pada dasarnya sumber hukum materiil memiliki kandungan atau cakupan yang sangat luas, bisa berasal dari pendekatan sosiologis dan sebagainya.

2) Sumber Hukum Formal

Sumber hukum dalam arti formal kenyataannya dapat didekati bentuk dan prosedur pembentukannya menjadi hukum positif oleh

⁴¹*Ibid.*, h. 11-12.

⁴²Supriadi, *Hukum Kehutanan dan Hukum Perkebunan di Indonesia* (Jakarta: PT Sinar Grafika), h.6.

pengembangan kewenangan hukum yang berwenang. Sumber formal hukum kehutanan berdasarkan hukum positif sebagai berikut:

a) Undang-Undang Dasar 1945

Dalam Hukum Tata Negara, posisi Undang-Undang Dasar 1945 merupakan sumber hierarki tertinggi peraturan perundang-undangan di Indonesia. Dalam artian Undang-Undang Dasar 1945 merupakan sumber segala peraturan perundang-undangan, karena dari sanalah semua hukumpositif merupakan penjabaran yang lebih rinci dari peraturan yang bersifat umum yang terdapat dalam UUD 1945.

b) Undang-Undang dan Peraturan Pengganti UU (Perpu)

Keberadaan Undang-Undang dalam tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia berada di bawah UUD 1945 dan merupakan produk hukum yang sangat strategis karena kehadirannya disetujui oleh *eksekutif* (Presiden) dan *legislatif* (Dewan Perwakilan Rakyat). Selain itu di Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) merupakan peraturan perundang-undangan yang sifatnya implementatif, yakni peraturan yang mengatur segala hal yang berkaitan dengan hak dan kewajiban warga masyarakat, masalah yang berkaitan dengan masalah ketatanegaraan dan lain-lain.⁴³

⁴³*Ibid.*,h.9.

c) Peraturan Pemerintah

Peraturan pemerintah merupakan peraturan yang kewenangan sepenuhnya dikeluarkan oleh Presiden sebagai Kepala Pemerintahan tertinggi dalam pengelolaan Negara Republik Indonesia. Keberadaan Peraturan Pemerintah diadakan sebagai peraturan pelaksanaan dari sebuah Undang-Undang, sehingga keberadaannya bersifat implementatif dan masih perlu ditindaklanjuti oleh peraturan yang lebih rendah, misalnya Keputusan Presiden maupun Keputusan Menteri maupun Peraturan Daerah.

d) Peraturan Presiden

Dalam Peraturan Presiden pada kenyataannya atau prakteknya terdapat dua muatan, yakni Keputusan Presiden dan Peraturan Presiden. Presiden mengeluarkan Keputusan Presiden kalau muatannya berkaitan dengan pengangkatan seorang pejabat, misalnya pengangkatan Menteri, Gubernur, Rektor, dan lain-lain. Sementara itu, jika Presiden akan mengeluarkan Peraturan Presiden, maka muatannya berkaitan dengan peraturan yang lebih rinci yang menjelaskan suatu masalah yang berhubungan dengan kepentingan masyarakat dan pembangunan.

e) Keputusan Menteri Kehutanan

Menteri sebagai pembantu Presiden dalam menjalankan tugasnya memiliki kewenangan untuk mengeluarkan suatu kebijakan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya yang lazim disebut Keputusan Menteri.⁴⁴

Berikut merupakan beberapa dasar hukum tentang hukum perlindungan hutan di Indonesia yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan pokok kehutanan
2. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 tentang konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya
3. Undang-Undang Nomor 12 tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman
4. Undang-Undang Nomor 16 tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan
5. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 1895 tentang Perlindungan Hutan
7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan

⁴⁴*Ibid.*, h.12-14.

8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2009 tentang Perlindungan Hutan Yang merupakan Amandemen dari Peraturan Pemerintah No.45 tahun 2004
 9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 10 tahun 2010 tentang Mekanisme Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan/atau Lahan.
 10. Undang-undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana
 11. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan
 12. Peraturan Gubernur Lampung `Lampung Nomor 6 Tahun 2015 tentang Penertiban dan Pengendalian Kawasan Hutan di Provinsi Lampung
- Peraturan-peraturan ini dibuat oleh pemerintah untuk mengatur berbagai hal mengenai perlindungan hutan. Peraturan ini sangat diperlukan agar usaha-usaha perlindungan hutan dapat diterapkan dengan baik dan mempunyai dasar hukum yang kuat.

Dalam pasal 12 Undang-Undang Dasar Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dijelaskan bahwa perlindungan hutan berasaskan kepada:

- (a) Keadilan dan kepastian hukum
- (b) Keberlanjutan
- (c) Tanggung jawab Negara
- (d) Partisipasi masyarakat

(e) Prioritas

(f) Keterpaduan dan koordinasi⁴⁵

e. Sanksi Pelanggaran Pasal 12 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013

Dalam pelanggaran Pasal 12 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 terdapat sanksi tindak pidana yang akan ditanggung yang terkandung dalam pasal 83 diantaranya:

- 1) Setiap orang yang melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah)
- 2) Bagi orang perseorangan yang bertempat tinggal di dalam dan/ atau di sekitar kawasan hutan, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 2 (dua) tahun dan/ atau pidana denda paling sedikit Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- 3) Bagi orang perseorangan yang memanfaatkan hasil hutan kayu yang diduga berasal dari hasil pembalakan liar akan dipidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta

⁴⁵Undang-Undang Republik Indonesia nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan

pidana denda paling sedikit Rp5000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000 (lima belas miliar rupiah).⁴⁶

f. Tujuan Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan

Pemberantasan perusakan hutan adalah segala upaya yang dilakukan untuk menindak secara hukum terhadap pelaku perusakan hutan baik langsung, tidak langsung, maupun yang terkait lainnya. Dalam pemberantasan perusakan hutan kewajiban untuk melakukan pemberantasan berada pada pemerintah dan pemerintah daerah. Pemberantasan perusakan hutan dilakukan dengan cara menindak secara hukum pelaku perusakan hutan, baik langsung, tidak langsung, maupun yang terkait lainnya.⁴⁷ Dalam rangka pencegahan perusakan hutan, Pemerintahan membuat kebijakan berupa:

- 1) Koordinasi lintas sektor dalam pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan
- 2) Pemenuhan kebutuhan sumber daya aparatur pengamanan hutan
- 3) Insentif bagi para pihak yang berjasa dalam menjaga kelestarian hutan
- 4) Peta menunjukkann kawasan hutan atau koordinat geografis sebagai dasar yuridis batas kawasan hutan⁴⁸

⁴⁶H. Joni, *Hukum Lingkungan Kehutanan.....*, h.340-341.

⁴⁷Ahamd Redi, *Hukum Sumber Daya Alam Dalam Sektor Kehutanan.....*,h.239.

⁴⁸*Ibid.*, h.238.

Berbagai kebijakan yang dibuat oleh Indonesia disebut terinspirasi kebijakan internasional, yang disepakati hampir seluruh negara di dunia. Berbagai kebijakan itu secara garis besar secara berlanjut merefleksikan dari hasil berbagai pertemuan dunia yang berprinsip dan mencari solusi untuk mengatasi masalah lingkungan hidup.

Awal keresahan dan kekhawatiran terhadap kerusakan lingkungan ternyata muncul secara meluas. Hal ini terutama didasarkan pada eksploitasi ekonomi yang nyaris tanpa batas, karena didasarkan pada pola hedonisme, sebagai akibatnya muncul kerusakan lingkungan dan degradasi terhadap kualitas lingkungan hidup. Sangat dirasakan kondisi ini khususnya di negara maju dalam pengelolaan ekonomi dengan basis industri yang rentan pencemaran lingkungan.⁴⁹

Penyelenggaraan kehutanan bertujuan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat yang berkeadilan dan berkelanjutan dengan:

- a) Menjamin keberadaan hutan dengan luasan yang cukup yang cukup dan sebaran yang profesional
- b) Mengoptimalkan aneka fungsi hutan yang meliputi fungsi konservasi, fungsi lindung, dan fungsi produksi untuk mencapai manfaat lingkungan, sosial, budaya, dan ekonomi yang seimbang dan lestari
- c) Meningkatkan daya dukung daerah aliran sungai

⁴⁹H. Joni, *Hukum Lingkungan Kehutanan.....*, h.45.

- d) Meningkatkan kemampuan untuk mengembangkan kapasitas dan keberdayaan masyarakat secara partisipatif, berkeadilan, dan berwawasan lingkungan sehingga mampu menciptakan ketahanan sosial dan ekonomi serta ketahanan terhadap akibat perubahan eksternal
- e) Menjamin distribusi manfaat yang berkeadilan dan berkelanjutan.⁵⁰

2. Fiqih Siyasah

a. Pengertian Fiqih Siyasah

Agar diperoleh pemahaman yang pas apa yang dimaksud dengan dengan Fiqh Siyasah, maka perlu dijelaskan pengertian masing-masing kata dari segi bahasa dan istilah. Kata Fiqh secara leksikal bearti tahu, paham dan mengerti. Secara (bahasa) Fiqh adalah keterangan tentang pengertian atau paham dari maksud ucapan si pembicara, atau pemahaman yang mendalam terhadap maksud-maksud perkataan dan perbuatan. Dengan kata lain istilah Fiqh menurut bahasa adalah pengertian atau pemahaman.⁵¹ Sedangkan kata siyasah yang berasal dari kata sasa, berarti mengatur, mengurus, dan memerintah.⁵²

Dari definisi di atas dapat dipahami bahwa Fiqh Siyasah adalah ilmu yang mempelajari tentang seluk-beluk pengaturan dan kebijaksanaan yang

⁵⁰Siswantoyo Dipodiningrat, *Pembelanjaan Perusahaan Hutan* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2015), h. 5.

⁵¹Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah Ajaran Pemikiran dan Sejarah*(Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1993), h.21.

⁵²Muhammad Iqbal, *Fiqh...*, h.3.

dibuat oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan dasar-dasar syariat Islam untuk mewujudkan kemaslahatan umat.⁵³

Menurut Abu Al-Wafa Ibn 'Aqil, Siyasah berarti suatu tindakan yang dapat mengantarkan rakyat lebih dekat kepada kemaslahatan dan lebih jauh dari kerusakan, kendati pun Rasulullah tidak menetapkan dan Allah juga tidak menurunkan wahyu untuk mengaturnya. Dalam redaksi yang berbeda Husai Fauzy Al-Najjar mendefinisikan Siyasah berarti pengaturan kepentingan dan pemeliharaan kemaslahatan rakyat serta pengambilan kebijakan (yang tepat) demi menjamin terciptanya kebaikan bagi mereka.

Dalam redaksi yang lebih ringkas Ibn Manzhur mendefinisikan Siyasah sebagai berikut: "mengatur sesuatu dengan cara yang membawa kepada kemaslahatan".⁵⁴

Secara redaksional ketiga definisi Siyasah yang dikutip di atas berbeda antara satu dengan yang lainnya. Namun demikian, esensi yang dikehendakinya sesungguhnya sama, yakni sama-sama menyatakan bahwa siyasah merupakan sebuah terminologi yang biasa dipergunakan untuk konsep pengaturan urusan umum dan tata kehidupan umat manusia dalam kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara yang diorientasikan untuk mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kemudharatan.⁵⁵

Sebagai ilmu ketatanegaraan dalam Islam, Fiqh Siyasah membahas tentang siapa sumber kekuasaan, siapa pelaksanaan kekuasaan, apa dasar

⁵³Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah*..., h.26.

⁵⁴Mujar Ibnu Syarif, *Fiqh Siyasah Doktrin dan Pemikiran Politik Islam* (Jakarta: PT. Gelora Aksara Pratama, 2008), h.9.

⁵⁵*Ibid.*, h.10.

kekuasaan dan bagaimana cara-cara pelaksanaan kekuasaan menjalankan kekuasaan yang diberikan kepadanya, dan kepada siapa pelaksanaan kekuasaan mempertanggungjawabkan atas kekuasaanya.⁵⁶

b. Ruang Lingkup Kajian Fiqh Siyasah

Mengenai ruang lingkup Fiqh Siyasah di kalangan pakar Fiqh Siyasah terjadi perbedaan pendapat. Diantaranya ada yang membagi menjadi lima bidang, ada yang menetapkan empat bidang atau tiga bidang pembahasan. Bahkan ada sebagian ulama yang membagi ruang lingkup kajian Fiqh Siyasah menjadi delapan bidang. Namun perbedaan tidaklah terlalu prinsip, karena hanya bersifat teknis. Menurut Imam al-Mawardi, di dalam kitabnya yang berjudul *Al-Ahkam Al-Sulthaniyyah*, lingkup kajian Fiqh Siyasah mencakup kebijakan pemerintah tentang:

- 1) *Siyasah dusturiyyah* (Peraturan Perundang-undangan)
- 2) *Siyasah maliyyah* (Ekonomi dan Moneter)
- 3) *Siyasah qadha'iyah* (Peradilan)
- 4) *Siyasah harbiyah* (Hukum Perang)
- 5) *Siyasah 'idariyyah* (Administrasi Negara)

Adapun Imam Ibn Taimiyyah, meringkasnya menjadi empat bidang kajian, yaitu:

- 1) *Siyasah qadha'iyah* (Peradilan)
- 2) *Siyasah idariyyah* (Amnistrasi Negara)

⁵⁶Munawir Sadjali, *Islam dan Tata Negara Ajaran Sejarah dan Pemikiran* (Jakarta: UI Press, 1991), h.3.

- 3) *Siyasah maliyyah* (Ekonomi dan Moneter)
- 4) *Siyasah dauliyyah/ Siyasah Kharijiyyah* (Hubungan Internasional)⁵⁷

Menurut Abdul Wahab Khallaf, ada tiga bidang kajian fiqh siyasah , yaitu:

- 1) *Siyasah Dusturiyyah* (Peraturan Perundang-undangan)
- 2) *Siyasah Maliyyah* (Ekonomi dan Moneter)
- 3) *Siyasah Kharijiyyah* (Politik Hubungan Internasional)

Berbeda dengan Abdul Wahab Khallaf, Abdurrahman Taj mengklasifikasikan bidang kajian fiqh siyasah menjadi tujuh macam, yakni:

- 1) *Siyasah Dusturiyyah* (Peraturan Perundang-undangan)
- 2) *Siyasah Tasyri'iyyah* (Politik Hukum)
- 3) *Siyasah Qadha'iyyah* (Politik Peradilan)
- 4) *Siyasah Maliyyah* (Politik Ekonomi dan Moneter)
- 5) *Siyasah Idariyyah* (Politik Administrasi Negara)
- 6) *Siyasah Tanfidziyyah* (Politik Pelaksanaan Perundang-undangan)
- 7) *Siyasah Khariyyah* (Hubungan Internasional)⁵⁸

Berdasarkan perbedaan pendapat di atas, pembagian Fiqh Siyasah dapat disederhanakan menjadi tiga bagian pokok. Pertama, *Siyasah Dusturiyyah* (Peraturan Perundang-undangan). Bagian ini meliputi pengkajian tentang penetapan hukum (*tasyri'iyyah*) oleh lembaga legislatif, peradilan (*qadha'iyyah*) oleh lembaga yudikatif, dan administrasi pemerintahan (*idariyyah*) oleh eksekutif. Kedua, *Siyasah Dauliyyah* (politik luar negeri). Bagian ini mencakup hubungan keperdataan antara warga negara yang

⁵⁷Muhammad Iqbal, *Fiqh....*, h.14.

⁵⁸Mujar Ibnu Syarif, *Fiqh Siyasah....*, h.16-17.

Muslim dengan warga negara yang non-Muslim yang berbeda kebangsaan (*al-siyasah al-duali al-'amm*) atau disebut juga dengan hubungan internasional. Hukum perdata internasional menyangkut permasalahan jual beli, perjanjian, perikatan dan hutang piutang yang dilakukan warga negara Muslim dengan warga lain. Ketiga, *Siyasah Maliyyah* (Politik Keuangan dan Moneter) antara lain membahas sumber-sumber keuangan negara, pos-pos pengeluaran dan belanja negara, perdagangan internasional, kepentingan/hak-hak politik, pajak, dan perbankan.⁵⁹

c. Siyasah Dusturiyyah

Siyasah Dusturiyyah menurut bahasanya terdiri dari dua suku kata yaitu *siyasah* itu sendiri serta *dusturiyyah*. Artinya *siyasah* dapat kita lihat di pembahasan di atas, sedangkan *Dusturiyyah* adalah Undang-Undang atau peraturan. Secara umum *Siyasah Dusturiyyah* adalah keputusan kepala negara dalam mengambil keputusan atau Undang-Undang bagi kemaslahatan umat. Menurut istilah, *Dustur* berarti kumpulan kaidah yang mengatur dasar dan hubungan kerja sama antara sesama anggota masyarakat dalam sebuah negara, baik yang tidak tertulis (*konvensi*) maupun tertulis (*konstitusi*).⁶⁰

Dalam *Siyasah Dusturiyyah* biasanya dibatasi hanya pengaturan dan Perundang-undangan yang dituntut oleh ihwal kenegaraan dari segi

⁵⁹Muhammad Iqbal, *Fiqh*..., h.15-16.

⁶⁰Agustina Nurhayati, *Konsep Kekuasaan Kepala Negara Dalam Fiqh Siyasah* (Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M IAIN Lampung, 2014), h.38.

persesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya. *Siyasah Dusturiyyah* mencakup bidang kehidupan yang sangat luas dan kompleks. Fiqh *Siyasah Dusturiyyah* umumnya tidak dapat dilepaskan dari dua hal pokok: Pertama, dalil-dalil *kulliy*, baik ayat-ayat Alquran maupun Hadis, *maqosidu syariah*, dan semangat ajaran Islam dalam mengatur masyarakat, yang tidak akan berubah sebagaimana pun perubahan masyarakat. Karena dalil-dalil *kulliy* tersebut menjadi unsur dinamisator dalam mengubah masyarakat. Kedua, aturan-aturan yang dapat berubah karena perubahan situasi dan kondisi, termasuk di dalamnya hasil ijtihad para ulama, meskipun tidak seluruhnya.⁶¹

Apabila kita lihat dari sisi lain Fiqh *Siyasah Dusturiyyah* dapat dibagi menjadi:

- 1) Bidang *Siyasah Tasri'iyah*, termasuk di dalamnya persoalan *ahlu hali wal aqdi*, perwakilan persoalan rakyat. Hubungan Muslimin dan non-Muslimin dalam satu negara, seperti Undang-Undang Dasar, Undang-Undang, peraturan pelaksanaan, peraturan daerah, dan sebagainya.
- 2) Bidang *Siyasah Tanfidiyah*, termasuk di dalamnya persoalan *imamah*, persoalan *ba'ah*, *wuzarah*, *waliy al-ahdi*, dan lain-lain.
- 3) Bidang *Siyasah Qadla'iyah*, termasuk di dalamnya masalah-masalah peradilan.

⁶¹H.A.Djazuli, *Fiqh Siyasah* (Jakarta: Kencana, 2003), h.47-48.

- 4) Bidang *Siyasah Idariyah*, termasuk di dalamnya masalah-masalah administratif dan kepegawaian.⁶²

Ulama-ulama terdahulu umumnya lebih banyak berbicara tentang pemerintahan dari pada negara, hal ini disebabkan antara lain:

- a) Perbedaan antara negara dan pemerintah, hanya mempunyai arti yang teoretis dan tidak mempunyai arti yang praktis sebab perbuatan negara dalam kenyataanya adalah perbuatan pemerintah, bahkan lebih konkret lagi orang-orang yang disertai tugas untuk menjalankan pemerintah
- b) Karena sangat eratnya hubungan antara pemerintah dan negara, negara tidak dapat berpisah dari pemerintah, demikian pula pemerintah hanya mungkin ada sebagai organisasi yang disusun dan digunakan sebagai alat negara.
- c) Kalau fuqaha lebih tercurah perhatiannya kepada kepala negara (imam), karena yang konkret adalah orang-orang yang menjalankan pemerintahan, yang dalam hal ini dipimpin oleh kepala negara (imam)
- d) Fakta sejarah Islam menunjukkan bahwa masalah yang pertama dipersoalkan oleh umat Islam setelah Rasullah wafat adalah masalah kepala negara, oleh karena itu logis sekali apabila para fuqaha memberikan perhatian yang khusus kepada masalah kepala negara dan pemerintahan ketimbang masalah kenegaraan lainnya.

⁶²*Ibid.*, h.48.

e) Masalah timbul dan tenggelamnya suatu negara adalah lebih banyak mengenai timbul dan tenggelamnya pemerintahan daripada unsur-unsur negara lainnya.

Walaupun demikian, ada juga diantara fuqoha dan ulama Islam yang membicarakan pula bagian-bagian lainnya dari negara, seperti Al-Farabi, Ibnu Sina, A-l-Mawardi, Al-Ghazali, dan Ibnu Khaldun.⁶³

Siyasah Dusturiyyah memiliki beberapa sumber diantaranya:

(1) Al-Quran

Al-Quran adalah sumber pokok aturan agama Islam yang utama yang dijadikan dasar dalam menentukan hukum. Al-Quran merupakan kalam Allah yang berisi firman-firman Allah dalam bentuk ragam hukum di dalamnya. Karena Al-Quran diyakini berasal dari Allah dan teks-teksnya dianggap suci, maka setiap muslim harus mengakui sebagai pondasi segala macam superstruktur Islam. Para tokoh-tokoh muslim banyak mencatat bahwasannya Al-Quran merupakan satu-satunya sumber yang paling tinggi dalam menentukan hukum-hukum lainnya, karena Al-Quran tidak pernah mengalami kondisi dan perubahan apapun walaupun perkembangan zaman terus berkembang.

(2) Sunah

Sunah sunah secara harfiah adalah suatu praktek kehidupan yang membudaya atau suatu norma perilaku yang diterima secara komunal oleh masyarakat yang meyakini meliputi segenap ucapan dan tingkah

⁶³*Ibid.*, h.49.

laku nabi. Proses periwayatan sunah biasanya disaksikan oleh beberapa orang yang mengetahui langsung kejadiannya tersebut dan disampaikan dari generasi ke generasi sejak zaman Nabi hingga akhir dari perawi yang meriwayatkan dengan meneliti sederetan perawi yang berkesinambungan.

(3) Ijma'

Dalam hukum Islam ijma' merupakan suatu keputusan bersama untuk menentukan suatu hukum yang baik demi kemaslahatan umat dengan cara musyawarah. Musyawarah ini timbul dari pemikiran kalangan ulama mufti, ahlio fiqh maupun pemerintahan.

(4) Qiyas

Qiyas adalah metode logika yang digunakan untuk memecahkan suatu masalah yang berkenaan dengan legalitas suatu bentuk perilaku tertentu dengan cara menetapkan satu kaitan positif atau negative antara bentuk perilaku yang satu dengan bentuk perilaku yang lainnya dengan satu prinsip umum. Adapun qiyas terbagi dalam:

(a) Qiyas *Al-aulawi* adalah analogy yang illat hukum cabangnya lebih

kuat dari pada illat pada hukum dasarnya. Artinya, suatu yang telah dijelaskan dalam nash Al-Quran atau hadis tentang keharaman melakukan dalam jumlah banyak adalah lebih utama. Sedikit ketaatan yang dipuji apabila dilakukan, maka melakukan ketaatan yang banyak lebih patut dipuji. Suatu yang diperbolehkan (mubah) dilakukan dalam

jumlah yang banyak, maka lebih utama apabila dilakukan dalam jumlah sedikit.

(b) Qiyas *al-mushawi* adalah qiyas yang kekuatan illat pada hukum cabang sama dengan hukum asal. Qiyas ini disebut juga dengan istilah *qiyas ma'na al-Asal* (nalogi terhadap makna hukum asal) yakni al-quran dan hadis nabi.

(d) Qiyas *al-adna* adalah analogy yang illat pada hukum cabangnya lebih lemah daripada illat pada hukum dasarnya.⁶⁴

d. Hutan Kawasan Dalam Fiqh Siyasah

Manusia sebagai khalifah di muka bumi ini harus bertindak sesuai dengan peraturan-peraturan yang dikehendaki oleh pencipta. Manusia mempunyai hubungan timbal balik dengan lingkungannya. Aktifitasnya mempengaruhi lingkungannya, sebaliknya manusia dipengaruhi oleh lingkungannya. Hubungan timbal balik demikian terdapat antara manusia sebagai individu atau kelompok atau masyarakat dan lingkungan alamnya.⁶⁵

Semua ketentuan-ketentuan yang dikehendaki oleh Allah telah terhimpun dalam Al-Quran dan penjelasannya diberikan oleh Allah melingkupi seluruh

⁶⁴Anjar Kurniawan, "Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Pelaksanaan Pembangunan Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa". (Skrpsi, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung, Bandar Lampung, 2014). h.33-38.

⁶⁵M. Daud Silalahi, *Hukum Lingkungan* (Bandung: Penerbit Alumni, 2001), h.9-10.

aspek kehidupan manusia, baik yang berkenaan hubungannya dengan Allah, maupun dalam hubungannya dengan sesama manusia dan lingkungannya.⁶⁶

Terkait pentingnya menjaga hutan kawasan dalam sebuah kehidupan bernegara merupakan sesuatu yang universal yang harus kita jaga, kita harus mempunyai sebuah kesadaran dalam kehidupan kita sebagai sebagai warga negara Indonesia untuk menjaga hutan kawasan. Sebagaimana Allah SWT dan Rasulullah Saw telah memberikan peringatan kepada manusia agar tidak melakukan kerusakan di bumi, akan tetapi manusia mengingkarinya. Allah SWT telah berfirman dalam Q.S Al-Baqorah ayat 11 yang berbunyi:

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ ﴿١١﴾

“Dan bila dikatakan kepada mereka, "Janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi". Mereka menjawab: "Sesungguhnya kami orang-orang yang mengadakan perbaikan." (QS.Al-Baqoroh (2) :11)⁶⁷

Dari penjelasan ayat di atas, akibat keserakahan manusia dan mengingkari petunjuk Allah SWT dalam mengelola bumi ini, menyebabkan terjadinya bencana alam dan kerusakan karena ulah tangan manusia sendiri.

Keadaan alam, lestari atau tidaknya tergantung kepada perilaku manusia sebagai penghuni bumi, sebab tantangan terbesar dimasa yang akan datang terletak kepada sikap dan perilaku penyimpangan masyarakat yang berlebihan dalam memanfaatkan sumber daya alam. Tindakan yang

⁶⁶Wahbah Al-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu (Jilid 6)*, terj, Abdul Hayyie Al-Kattani, dkk (Depok; Gema Insani, 2011), h.52.

⁶⁷Q.S Al-Baqoroh (2) :11

membawa kerusakan (mudarat) cepat atau lambat, pasti akan merugikan orang lain secara keseluruhan karena tindakan seperti ini kontradiksi dengan prinsip-prinsip syariat.

Firman Allah dalam Q.S Ar-Rum ayat 41 sebagai berikut:⁶⁸

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ
الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿٤١﴾

“Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan Karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar).” (QS. Ar-Rum (30) : 41)⁶⁹

Firaman Allah SWT dalam Q.S Al-Baqarah ayat 30 yang berbunyi:

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن
يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ
مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿٣٠﴾

Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat: "Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi." mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui."

Kedua ayat di atas menjelaskan bahwa Allah swt menjadikan manusia sebagai khalifah di bumi agar dapat mensejahterakan dan memakmurkan

⁶⁸Dapartemen Agama RI, AlQurann dan Terjemahnya Juz 1-30 (Surabaya: Dana Karya, 2008), h.52.

⁶⁹Q.S. Ar-Rum (30) :41

bumi, sehingga kedua ayat di atas menjelaskan bahwa menjaga perusakan tanaman, pemusnahan binatang dan segala perbuatan merusak lingkungan hidup merupakan larangan agama. Dalam hal ini misalnya kerusakan hutan akibat ulah manusia mengakibatkan dampak yang besar untuk masyarakat yang lainnya.

Hal ini sesuai dengan hadits Nabi Muhammad SAW, yang diriwayatkan dari Abdullah bin Habsyi yang berbunyi:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حُبْشَى قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- مَنْ
قَطَعَ سِدْرَةَ صَوَّبَ اللَّهُ رَأْسَهُ فِي النَّارِ

Diceritakan dari Abdullah bin Hasbyi ia berkata “Rasullah SAW bersabda: “barang siapa menebang pohon bidara maka Allah akan membenamkan kepalanya dalam api neraka.” (HR. Abu Daud)⁷⁰

Penyebutan pohon bidara pada hadits di atas berarti dilarang keras memotong setiap pohon-pohon yang memberikan manfaat bagi manusia atau menompang ekosistem sebagaimana keberadaan pohon bidara yang cukup bermanfaat. Ancaman keras tersebut merupakan usaha untuk menjaga kelestarian pohon, karena keberadaan pepohonan tersebut banyak memberi manfaat bagi lingkungan sekitar. Kecuali, jika penebangan itu dilakukan dengan pertimbangan cermat dan dibarengi menanam pepohonan baru agar dapat menggantikan fungsi pohon yang sudah ditebang. Namun, jika penebangan pohon-pohon yang bermanfaat tersebut tidak dibarengi dengan penanaman pohon kembali maka akan merugikan banyak orang sekitarnya dan akan menimbulkan bencana alam seperti tanah longsor, banjir dan

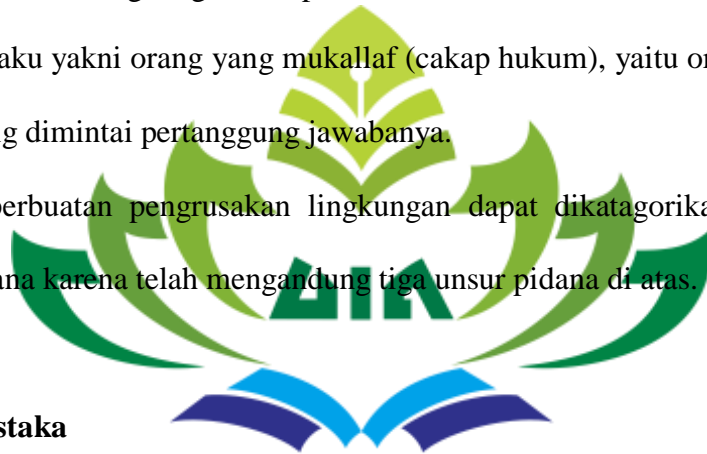
⁷⁰Abu Daud, *Sunan Abu Daud*, 947, hadits no.5239.

sebagainya. Padahal keberadaan hutan sangat berguna bagi keseimbangan sebagai tempat perlindungan binatang.

Dalam Islam terdapat tiga unsur yang harus dipenuhi sehingga perbuatan ini dapat dikategorikan sebagai tindak pidana.

- 1) Adanya nash Al-Quran yang melarang dan adanya ancaman hukuman bagi pelakunya.
- 2) Adanya perbuatan yang berbentuk jarimah, dalam hal ini adalah merusak lingkungan hidup
- 3) Pelaku yakni orang yang mukallaf (cakap hukum), yaitu orang-orang yang dimintai pertanggung jawabannya.

Jadi perbuatan merusak lingkungan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana karena telah mengandung tiga unsur pidana di atas.



B. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka merupakan acuan untuk penelitian selanjutnya, yaitu mengemukakan hasil penelitian terdahulu yang berhubungan dengan topik penelitian yang dilaksanakan. Adapun beberapa penelitian terdahulu yang menjadi landasan dalam melakukan penelitian ini diantaranya sebagai berikut:

Pertama, Aji Ayu Purwatiningsih (2015) Universitas Negeri Semarang yang berupa skripsi yang berjudul “Implementasi Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.5/Menhut-11/2010 tentang Standar Peralatan Polisi Kehutanan Terhadap Kinerja Polisi Kehutanan di Balai Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Tengah”. Permasalahan yang ada dalam penelitian ini adalah tidak terlaksananya standar

peralatan polisi kehutan di BKSDA Jawa Tengah berdasarkan Peraturan Menteri Kehutan Nomor: P.5/Menhut-11/2010 tentang standar peralatan polisi kehutan terhadap kinerja polisi kehutan BKSDA Jawa Tengah.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis sosiologis yakni menggunakan hubungan (korelasi) antara berbagai gejala atau variabel sebagai alat pengumpul datanya. Hasil penelitian ini adalah upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut adalah dengan melakukan perubahan dan perbaikan terhadap sarana dan prasarana yang telah mengalami kerusakan dan menempatkan sarana dan prasana sesuai dengan kondisi di lapangan.⁷¹

Kedua, penelitian dari Imam Akbaru Husein (2015) Fakultas Hukum Universitas Brawijaya yang berupa skripsi dengan judul “Perlindungan Hukum Kawasan Hutan Negara Terhadap Tindak Pidana Perusakan Hutan (Studi KPH Nganjuk Unit 11 Jawa Timur)”. Permasalahan yang ada dalam penelitian ini adalah aktifitas dalam perusakan hutan saat ini dilakukan secara terbuka dan terorganisasi dalam kegiatan yang dilakukan oleh suatu kelompok yang terstruktur, yang terdiri dari 2 orang atau lebih dan bertindak bersama-sama pada waktu tertentu. Kelompok terstruktur tidak termasuk kelompok masyarakat yang bertempat tinggal di dalam atau di sekitar kawasan hutan yang melakukan perlandangan tradisional atau melakukan penebangan kayu di luar hutan konservasi dan hutan lindung untuk keperluan sendiri dan tidak untuk tujuan komersial.

⁷¹Aji Ayu Purwatiningsih, “Implementasi Peraturan Menteri Kehutan Nomor P.5/Menhut-11/2019 Tentang Standar Peralatan Polisi Kehutan Terhadap Kinerja Polisi Kehutan di Balai Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Tengah” (Skripsi, di Universitas Negeri Semarang, 2015).

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang dilakukan dengan cara langsung diperoleh dari narasumber. Hasil penelitian ini adalah dalam pelaksanaan perlindungan hukum kawasan hutan negara terhadap tindak pidana perusakan hutan yang mencakup adanya faktor-faktor masyarakat yang melakukan tindak pidana perusakan hutan. Selain dari adanya faktor masyarakat yang menjadi pelaku tindak kejahatan, oknum di dalamnya juga menjadikan adanya faktor pendukung untuk kelancaran adanya tindak pidana perusakan hutan. Alasan oknum ikut dalam proses berjalannya melawan hukum pada kawasan hutan negara dikarenakan kurangnya kesejahteraan untuk oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab sehingga menjadikan peluang pada masyarakat untuk melakukan perusakan.⁷²

Ketiga, Aziz Kurnia Wibawa (2015) Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta yang berupa skripsi yang berjudul “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pembakaran Hutan Guna Pembukaan Lahan”. Permasalahan dalam penelitian ini adalah maraknya kasus kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Indonesia akibat dari lemahnya penegakan hukum lingkungan dalam menjerat para pelaku pembakaran hutan saat ini.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif (doktrinal), yaitu usaha inventarisasi hukum positif, penemuan asas-asas dan dasar falsafah hukum positif serta penelitian yang berupa usaha penemuan hukum yang layak diterapkan untuk menyelesaikan suatu hukum perkara tertentu. Hasil dari

⁷²Imam Akbaru Husein, “Perlindungan Hukum Kawasan Hutan Negara Terhadap Tindak Pidana Perusakan Hutan”. (Skripsi, Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2015).

penelitian ini adalah lemahnya pemerintah terkait yang tidak menerapkan dan menegakkan hukum yang berlaku sehingga banyak sekali terjadi pembakaran hutan.⁷³

Dari beberapa skripsi di atas kebaruan skripsi peneliti yang berjudul Implementasi Pasal 12 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Perspektif Fiqh Siyasah (Study Hutan Kawasan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan Desa Rata Agung Kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir Barat) sedikit berbeda dari skripsi-skripsi sebelumnya dari segi pembahasan, studi penelitian, dan metode penelitian yang digunakan. Peneliti saat ini membahas tentang Implementasi Pasal 12 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 di Desa Rata Agung Kabupaten Pesisir Barat dan dalam perspektif fiqh siyasah, karena pada kenyataan di lapangan Implementasi Pasal 12 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 belum sesuai dengan yang diharapkan. Metode yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif yaitu, berupa prosedur yang menghasilkan data deskriptif, yaitu suatu gambaran yang melukiskan secara sistematis fakta atau karakteristik populasi tertentu secara aktual dan cermat.

⁷³Aziz Kurnia Wibawa, "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pembakaran Hutan Guna Pembukaan Lahan". (Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2015).

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian*. Bandung: PT. Citra Aditya Bhakti, 2004.
- Abdul Muis Yusuf, *Hukum Kehutanan di Indonesia*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2011.
- Abdul Muis Yusuf, *Hukum Lingkungan Konservasi Hutan*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2011.
- Agustina Nurhayati, *Konsep Kekuasaan Kepala Negara Dalam Fiqh Siyasah*. Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M IAIN Lampung, 2014.
- Ahmad Redi, *Hukum Sumber Daya Alam Sektor Kehutanan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Ahmad Syafii Maarif, *Islam dan Masalah Kenegaraan*. Jakarta: LP3ES, 1985.
- Aji Prasetyo Pujiyono, *Skripsi*. Ponegoro Law Review: 2013.
- Alam Setia Zein, *Aspek Pembinaan Hutan dan Strafikasi Hutan Rakyat Cetakan Pertama*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 1998.
- Alam Setia Zain, *Hukum Lingkungan Konservasi Hutan*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1997.
- Amruddi dan Zainal Arifin Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Balai Pustaka, 2006.
- Andhi Prasetyo, *Pengelolaan Hutan System Masyarakat*. Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
- Bambang Pamulardi, *Hukum Kehutanan dan Pembangunan Bidang Kehutanan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995.
- Dapartemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya Juz 1-30*. Surabaya: Dana Karya, 2008.
- Dapartemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*. Jakarta: Gramedia Pustaka Umum, 2011.
- Endang Suhendang, *Pengantar Ilmu Kehutanan Cetakan Pertama*, (Bogor: IPB Press, 2018.

Hasanu Simon, *Hutan Jati dan Kemakmuran*. Yogyakarta: Bigraf Publishing, 2000.

H.Joni, *Hukum Lingkungan Kehutanan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.

Imam Akbaru Husein, *Skripsi*, Universitas Brawijaya: 2015.

Masykuri, *Skripsi*, Universitas Hasanuddin: 2013

Muhammad Iqbal, *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Edisi Pertama. Jakarta: Prenadamedia Group, 2014.

Muhammad Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2012.

Mujar Ibnu Syarif, *Fiqh Siyasah Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*. Jakarta: PT. Gelora Aksara Pratama, 2008.

Munawir Sadjali, *Islam dan Tata Negara Ajaran Sejarah dan Pemikiran*. Jakarta: UI Press, 1991.

Perpustakaan Nasional, *Hutan Lingkungan dan Paradigma Pembangunan*. Jakarta: Pancuran Alam, 2007.

Rahmadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014.

Salim, *Dasar-Dasar Hukum Kehutanan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2003.

Siswantoyo Dipodiningrat, *Pembelanjaan Perusahaan Hutan*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2015.

Supriadi, *Hukum Kehutanan dan Hukum Perkebunan di Indonesia*. Jakarta: PT. Sinar Grafika, 2010.

Susiadi, *Metode Penelitian*. Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M Institut Agama Islam Raden Intan, 2015.

Sutrisno Hadi, *Metode Research*, jilid , Jakarta: Andi Obset, 1990.

Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah Ajaran Pemikiran dan Sejarah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1993.

Tim Prima Pena, *Kamus Ilmiah Populer*, Edisi Lengkap. Surabaya: Gita Media Press, 2006.

Transtoto Handadhari, *Kepedulian yang Terganjil. Mengungkap Belantara Masalah Kehutanan Indonesia*, Jakarta: Kompas Gramedia, 2009.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, Pasal 12.

Wahbah AL-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu (jilid 6)*. Depok: Gema Insani, 2011.

